

KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA TAHUN 2015

READINESS OF THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAJEMEN SYSTEM AT BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK YOGYAKARTA IN 2015

Oleh: Agus Dwi Prabowo (09504241023), universitas negeri yogyakarta.

agusdwiprabowo@yahoo.co.id

1. Moch Solikin, M.Kes.
2. Agus Partawibawa, M.Pd.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta, yang berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif. Subyek penelitian adalah 8 responden yaitu 4 Kepala Seksi dan 4 Instruktur di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan angket dan di-*cross-check* dengan dokumentasi dan wawancara. Uji validitas instrumen dilakukan melalui *expert judgment*. Analisis data disajikan dalam bentuk grafik balok dan disajikan secara ringkas pada tabel yang berupa presentase skor ketercapaian kemudian dikategorikan dan dideskripsikan dengan berdasarkan sub indikator. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kesiapan penerapan Sistem Manajemen K3 di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta tercapai 37,78%, masuk pada kategori kurang siap. Ketercapaian yang masuk pada kategori kurang siap secara umum disebabkan pelaksanaan K3 belum terdokumentasi sesuai sistem manajemen K3.

Kata kunci: penerapan, K3, BLPT.

Abstract

This research aimed to determine the Readiness of the implementation of Occupational Safety and Health at Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta based on Occupational Safety and Health management system. This research is quantitative descriptive research. Subjects were 8 respondents, they are 4 Section Chairmans and 4 instructors of Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta . The data was collected using questionnaires and was crosschek with interview and documentation. The validity test of the instrument is done through by experts judgment. Analysis of the data presented in bar graph form and are summarized in the table in the form of a percentage score achievement then described based on sub indicator. Based on the results of the research concluded that the Readiness of the implementation of Occupational Safety and Health at Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta has a 37.78% achievement so go on less category. The achievement of which enter the less category in general caused the implementation of Occupational Safety and Health have not been documented according to the Occupational Safety and Health Manajemen System.

Keywords: implementation, K3, BLPT.

PENDAHULUAN

Manusia adalah sumber daya penting dalam pembangunan. Seiring dengan pembangunan, perkembangan teknologi dalam proses produksi dapat memberikan kemungkinan yang besar timbulnya pengaruh terhadap tenaga kerja. Adanya teknologi yang disertai peralatan modern disamping membawa kemudahan dalam berproduksi juga mempunyai tingkat resiko kecelakaan yang tinggi.

Kecelakaan kerja akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif yaitu, berupa kerugian ekonomis, Total kerugian sangat banyak, yaitu Rp 280 triliun (dalam <http://finance.detik.com/read//angka-kecelakaan-kerja-di-ri-masih-tinggi> diakses pada 3 Maret 2014). Sedangkan kerugian sumber daya manusia, *Internasional Labor Organization* (ILO) memperkirakan sekitar 321.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja (dalam http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204594/lang--en/index.htm diakses pada 3 Maret 2014).

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan pencegahan kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung diri, yang diharuskan dalam tempat kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.

Analisa kecelakaan menunjukkan bahwa setiap kecelakaan memiliki faktor penyebabnya.

Sebab-sebab tersebut dapat bersumber dari alat-alat mekanik dan lingkungan serta dari manusia itu sendiri. Untuk mencegah kecelakaan, penyebab-penyebab ini harus dihilangkan. 85% dari sebab-sebab kecelakaan adalah faktor manusia. Maka dari itu usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada teknik mekanik juga harus memperhatikan secara khusus aspek manusiawi (Suma'mur, 1985: 3).

Berdasar beberapa hal tersebut, maka sangat diperlukan usaha-usaha perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah sudah lama merasakan perlunya melaksanakan usaha-usaha perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja. Diantaranya adalah melalui pendidikan, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lembaga pendidikan seperti balai-balai latihan pendidikan teknik atau kejuruan yang digunakan oleh banyak kalangan terutama siswa SMK adalah salah satu sasaran utama terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana tujuan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Hal tersebut menunjukkan peserta didik balai latihan pendidikan teknik akan selalu berhubungan langsung dengan masalah keselamatan kerja baik di bengkel praktik maupun di industri kerjanya nanti, sehingga dalam kegiatan praktik di bengkel, peserta didik dibudayakan untuk menerapkan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Usaha penerapan pedoman K3 di Indonesia salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut telah dilaksanakan di dunia industri.

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta telah menerapkan pedoman K3 pada setiap kegiatan pembelajaran di bengkel praktik, namun dalam penerapannya masih menemui berbagai masalah. Masalah yang terkait dengan penerapan K3 di BLPT antara lain: masalah terkait kecelakaan kerja, kurangnya peringatan K3 pada alat dengan potensi bahaya, alat-alat yang tidak rapi saat ditinggalkan, tidak ada catatan kecelakaan kerja sebagai evaluasi. Proporsi terbesar terjadinya kecelakaan diawali salah satunya dari kurang efisiennya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tidak adanya sistem manajemen K3 dalam manajemen BLPT, memungkinkan masalah kembali terjadi. Maka diperlukan penilaian terhadap penerapan K3 yang berdasarkan pada sistem manajemen K3. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan penerapan K3 di waktu mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau gambaran mengenai Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta tahun 2015.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Februari sampai dengan Mei 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kepala Seksi dan instruktur masing-masing seksi, yang ada di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini adalah:

1. Data angket/kuesioner, berupa angket tertutup dan angket campuran.
2. Data dokumentasi, data berupa dokumen-dokumen, sebagai pembuktian dari jawaban angket/kuesioner.
3. Data wawancara, berupa penjelasan dari setiap pertanyaan angket dan digunakan untuk mengoreksi jawaban yang kontras dari setiap responden

Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket/kuesioner, dikembangkan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Data dokumentasi, data berupa dokumen-dokumen, sebagai pembuktian dari jawaban angket/kuesioner.
3. Wawancara, berpedoman sesuai pertanyaan angket.

Teknik Analisis Data

Berkaitan dengan digunakannya multi-metode dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan triangulasi. Menurut Sugiyono (2011: 330) triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka dari itu terlebih dahulu dilakukan pencocokan kebenaran data dari setiap aspek yang ditanyakan terhadap data (data angket, dokumentasi dan wawancara).

Dalam menganalisis, peneliti memakai langkah-langkah yaitu menghitung jumlah skor dari data yang sudah dicocokkan kebenarannya antara data angket yang dikroscek dengan dokumentasi, kemudian menentukan prosentase pelaksanaan. Perhitungannya menggunakan rumus prosentase (Sugiyono, 2012: 194) sebagai berikut:

$$PS = \frac{ST}{SM} \times 100\%$$

Keterangan:

PS = Presentase Skor

ST = Skor Total yang dihasilkan

SM = Skor Maksimum yang diperoleh

Tingkat ketercapaian kesiapan sistem manajemen K3 dikriteriakan menjadi 4 kriteria, yaitu: Siap, Cukup, Kurang Siap, dan Tidak Siap, yang diambil dari skala bersifat kualitatif (Arikunto, 1995: 352), dikatakan:

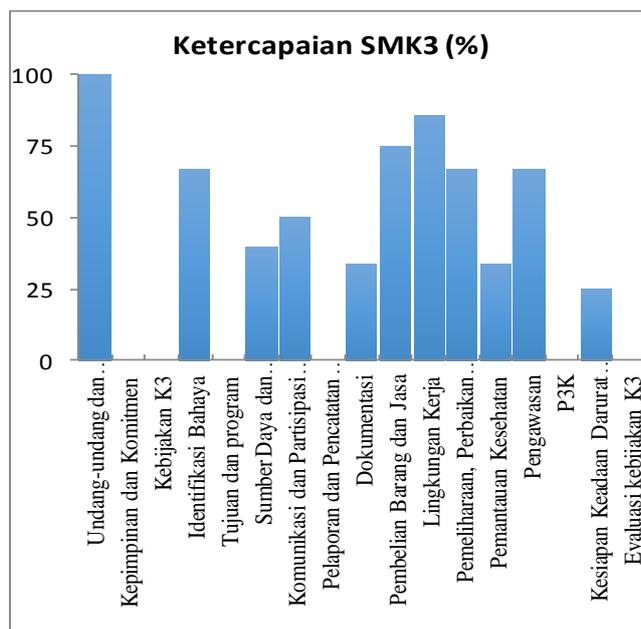
1. Siap, jika (76% - 100%)
2. Cukup Siap, jika (51% - 75%)
3. Kurang Siap, jika (26% - 50%)
4. Tidak Siap, jika (0% - 25%).

HASIL PENELITIAN

Pendesripsian atau penyajian data dilakukan dengan menyimpulkan data-data hasil penelitian yang berasal dari data angket beserta wawancara, observasi, dokumentasi per sub indikatornya dan selanjutnya data diprosentasekan, kemudian data dikriteriakan berdasarkan kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan penerapan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 37,78% sehingga masuk pada kriteria kurang siap. Hasil dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Gambar 1. Grafik Ketercapaian SMK3

Secara rinci ketercapaian masing-masing indikator penerapan K3 adalah sebagai berikut: Indikator Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku memiliki ketercapaian 100%; Indikator Komitmen dan Kebijakan K3: Kepimpinan dan Komitmen 0%, Kebijakan K3 0%; Indikator Perencanaan: Identifikasi Bahaya 66,66%, Tujuan dan program 0%; Indikator Penerapan: Sumber Daya dan Tanggung Jawab 40%, Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik 50%, Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja 0%, Dokumentasi 33,33%, Pembelian Barang dan Jasa 75%, Lingkungan Kerja 85,71%, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana 66,66%, Pemantauan Kesehatan 33,33%, Pengawasan 66,66%, P3K 0%, Kesiapan Keadaan Darurat atau Darurat 25%; Indikator Evaluasi kebijakan K3 0%.

B. Pembahasan

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebiakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penerapan K3 adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan K3. Penelitian kesiapan penerapan sistem

Kesiapan Penerapan Sistem (Agus Dwi Prabowo) 21
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi bagaimana penerapan pedoman K3 yang dilakukan oleh setiap seksi di BLPT Yogyakarta. Sehingga pada akhirnya hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan setiap aspek K3 dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Deskripsi pembahasan hasil penelitian dijelaskan di bawah ini:

1. Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku

Undang-undang dan peraturan yang berlaku digunakan dalam hal ini adalah peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam hal ini BLPT sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia, perlu mengetahui terdapatnya undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk menerapkan program K3 dalam Sistem Manajemen K3.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua seksi di BLPT pengetahuan penggunaan undang-undang dan peraturan yang berlaku tercapai 100%. Dari data tersebut penggunaan atau pengetahuan pihak BLPT Yogyakarta, telah seluruhnya mengetahui atau menggunakan adanya undang-undang dan peraturan K3 yang berlaku. Undang-undang dan peraturan ini digunakan dalam pengajaran kompetensi K3. Dalam Peraturan Gubernur

No. 7 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga, bahwa K3 termasuk dalam kompetensi minimal yang ada di BLPT Yogyakarta. Dalam kompetensi K3 ini terdapat materi undang-undang dan peraturan K3.

2. Komitmen dan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase indikator komitmen dan kebijakan tercapai 0%. Hal yang sangat mempengaruhi rendahnya pencapaian tersebut adalah tidak adanya unit khusus K3 dan tidak adanya dokumen yang mendukung. Akan tetapi ketercapaian 0% dari indikator kepemimpinan dan kebijakan, tidak berarti secara tegas bahwa tidak ada komitmen atau dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Setiap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan praktik di BLPT Yogyakarta selalu mengutamakan dan didasarkan pada komitmen terhadap K3. Namun memang, belum adanya unit khusus K3 menyebabkan komitmen dan kebijakan K3 belum terdokumentasi. Secara khusus setiap sub indikator komitmen dan kebijakan dijelaskan di bawah ini.

a. Kepimpinan dan Komitmen

Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komitmen tercapai 0%. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya unit khusus dalam penanganan K3 di BLPT Yogyakarta, sehingga tidak ada penempatan unit K3 dalam struktur organisasi yang dapat menentukan

keputusan program di BLPT. Hal tersebut terindikasi dari tidak adanya unit K3 dalam uraian tugas yang ada di BLPT. Dengan tidak adanya tim K3 ini maka pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Terlebih tidak ada pelatihan K3 secara khusus terhadap tenaga kerja maupun pengajar di BLPT. Setiap seksi mengusahakan pelaksanaan K3 sesuai seksinya masing-masing di BLPT Yogyakarta.

b. Kebijakan K3

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Hal ini didasarkan pada belum adanya dokumentasi kebijakan K3 sebagaimana di maksud dalam sistem manajemen K3. Dikarenakan kebijakan K3 yang tertulis secara spesifik tertulis belum ada, kebijakan penerapan K3 di BLPT Yogyakarta hanya berdasarkan tata tertib yang ada di bengkel setiap seksi BLPT Yogyakarta, yaitu hanya berupa perintah dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan peserta didik saat berada di bengkel.

Sistem Manajemen K3 dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Kebijakan K3 yang telah dikonsultasikan dalam manajemen dan tersosialisasi, dapat meningkatkan penerapan K3 diseluruh tingkatan dan lingkungan BLPT Yogyakarta.

3. Perencanaan

Dalam sistem manajemen K3, perencanaan adalah tindak lanjut dari komitmen dan kebijakan K3. Secara khusus dari semua *item* dalam setiap sub indikator, indikator perencanaan tercapai hasil 33,33%. Hasil tersebut didapat dari pelaksanaan identifikasi bahaya di BLPT. Identifikasi potensi bahaya, membuktikan adanya komitmen terhadap K3. Namun seperti halnya indikator komitmen dan kebijakan, rendahnya pencapaian indikator perencanaan disebabkan belum adanya dokumentasi prosedur identifikasi bahaya serta dokumen tujuan dan program, sesuai dengan pedoman penerapan sistem manajemen K3. Pembahasan setiap sub indikator dalam indikator perencanaan, dijelaskan di bawah ini.

a. Identifikasi Bahaya

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa identifikasi bahaya di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66,66%. Dalam hal ini BLPT dan setiap seksi telah melakukan beberapa identifikasi bahaya yang ada di lingkungan BLPT Yogyakarta. Sesuai dengan pedoman perencanaan Sistem Manajemen K3 serta sesuai PP No. 50 tahun 2012 pasal 9 ayat 2 yaitu dengan mempertimbangkan: a. Hasil penelaah awal, b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, c. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa merencanakan bagaimana proses dan tempat untuk melaksanakan kegiatan dan proses

diklat/ pembelajaran yang lingkungannya aman, jauh dari resiko terjadinya kecelakaan kerja. Tidak ada prosedur yang jelas secara tertulis dalam identifikasi bahaya di BLPT Yogyakarta membuat identifikasi bahaya tidak dapat dipetakan secara jelas dan terkoordinasi pada setiap seksi serta lingkungan BLPT secara luas.

b. Tujuan dan program

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan program K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Tidak terdapatnya tujuan dan program K3 dikarenakan belum adanya kebijakan K3 yang jelas dan terdokumentasi sesuai dengan panduan sistem manajemen K3. Hal tersebut membuat pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta berjalan kurang terarah, sehingga akhirnya memungkinkan tidak bisa mengikuti program-program K3 yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pedoman Sistem manajemen K3, kebijakan K3 dibuat berguna dalam membuat perencanaan K3 yang termasuk penentuan program dan tujuan pelaksanaan K3. Tidak adanya program yang ditetapkan oleh pimpinan inilah yang kemudian sulit untuk mengukur pencapaian penerapan K3, terutama pada kecelakaan yang tidak diketahui oleh instruktur praktik, tidak terdokumentasi maupun potensi bahaya yang tidak kasat mata.

4. Penerapan

Dari seluruh sub indikator dalam Indikator penerapan, secara umum tercapai 43,25%. Meskipun hasil tersebut masuk dalam kategori kurang, namun pada beberapa sub indikator tercapai hasil yang cukup tinggi. Hasil pencapaian yang cukup tinggi tersebut yaitu pada sub indikator lingkungan kerja, pemeliharaan sarana, pembelian barang dan jasa, serta pengawasan. Tingginya pencapaian beberapa sub indikator yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan praktik/ pembelajaran, menunjukkan perhatian atau komitmen BLPT Yogyakarta terhadap pelaksanaan K3. Hal tersebut memungkinkan jarang terjadi kecelakaan di BLPT Yogyakarta, meskipun pencatatan kecelakaan kerja itu sendiri belum terdokumentasi secara khusus. Setiap sub indikator dalam indikator penerapan dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini.

a. Sumber Daya dan Tanggung Jawab

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya dan Tanggung Jawab K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 40%. Dikarenakan penunjukkan penanggung jawab K3 secara jelas belum ada. Begitu juga belum terdapat tim dalam setiap seksi yang menangani K3. Instruktur/ guru belum mendapat pelatihan K3 secara khusus. Di BLPT Yogyakarta semua instruktur/ guru mempunyai tanggung jawab bersama dan mempunyai wewenang yang sama terhadap K3 di BLPT Yogyakarta. Instruktur/ guru yang

bertanggung jawab menangani kecelakaan kerja yaitu instruktur/ guru yang sedang mengajar/ bertanggung jawab terhadap diklat saat terjadi kecelakaan. Namun dengan diberinya tanggung jawab yang sama kepada setiap instruktur/ guru, maka akan lebih baik semua instruktur/ guru dan bahkan karyawan lain diberi pelatihan K3 agar penerapan K3 berjalan dengan lebih baik.

b. Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik

Komunikasi dan Partisipasi dengan Peserta Didik tercapai 50% dalam pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta. Hal tersebut didapat dari penyebaran informasi K3 kepada peserta didik menggunakan media poster-poster K3. Belum ada pelatihan K3 bagi peserta didik secara khusus. Hal ini disebabkan penggunaan layanan BLPT saat ini yang relatif pendek rentang waktunya, tidak memungkinkan penyediaan waktu khusus pada setiap paket diklat. Namun dalam pelaksanaan praktik peserta didik tetap dihimbau mengutamakan K3, sebagaimana tertera dalam jobsheet praktik. Sementara itu tidak adanya tim khusus K3 membuat penyebaran informasi K3 tidak berjalan lancar. Tim K3 adalah tim yang dibentuk secara spesifik untuk menangani keadaan darurat, inspeksi dan memberikan informasi kepada peserta didik melalui papan pengumuman yang memuat anggota tim K3. Bahkan di perusahaan

pembentukan tim K3 sudah diwajibkan, menurut Suma'mur (1985: 314) tujuannya adalah adanya peningkatan keselamatan melalui kerjasama bipartit, antara pengusaha dan buruh. Sehingga perlunya dibentuk Tim K3 di BLPT supaya ada kerjasama antara instruktur/guru dan peserta didik dalam meningkatkan K3 di lingkungan BLPT.

c. Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaporan dan Pencatatan Kecelakaan Kerja di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%, hal ini karena setiap kecelakaan yang terjadi di BLPT belum dicatat secara khusus. Tidak ada prosedur pelaporan terjadinya insiden atau pencacatan setelahnya. Sesuai dengan pernyataan bapak Heru S., bahwa belum ada pencatatan kecelakaan kerja karena kecelakaan yang terjadi jumlahnya sedikit. Bila terjadi kecelakaan akan diobati sesuai dengan kemampuan BLPT Yogyakarta. Bila diperlukan pengobatan dan perawatan yang lebih baik, maka korban akan di rujuk, ke layanan kesehatan atau rumah sakit di luar BLPT.

Menurut Suma'mur (1985: 13) pencatatan kecelakaan kerja pada tahun-tahun yang berbeda sangat berguna untuk menilai kecelakaan bertambah atau berkurang dan untuk mengetahui efektif tidaknya usaha pencegahan. Meskipun kecelakaan yang terjadi sangat sedikit, namun pembuatan dokumentasi

kecelakaan kerja yang terjadi tetap diperlukan. Dengan tidak adanya pencatatan kecelakaan yang terjadi maka BLPT tidak dapat mengetahui kinerja K3 yang telah dilaksanakan, terlebih untuk menjadi evaluasi potensi bahaya yang terjadi di tahun yang cukup lama berlalu yang dapat timbul kembali tanpa diketahui oleh orang yang ada di BLPT Yogyakarta.

d. Dokumentasi

Dari hasil penelitian, Dokumentasi memiliki ketercapaian 33,33%. Hasil ini didapat karena tidak adanya identifikasi dalam penyimpanan dan penggunaan dokumentasi K3. Juga tidak ada prosedur persetujuan, penerbitan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen K3. Di setiap seksi BLPT Yogyakarta memang memiliki dokumen-dokumen K3 seperti poster K3, undang-undang dan peraturan K3. Namun dengan tidak adanya identifikasi dan pengendaliannya membuat dokumentasi K3 tidak terawat. Hal ini terlihat dari beberapa poster yang telah usang dan sulit terbaca dengan jelas.

e. Pembelian Barang dan Jasa

Dari hasil penelitian, pembelian barang dan jasa memiliki ketercapaian 75%. BLPT adalah badan layanan milik daerah yang berstatus sebagai kuasa pengguna anggaran, maka dalam melakukan pembelian barang dan jasa telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pernyataan bapak Drihardono, bahwa pembelian barang

dan jasa telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam melakukan konsultasi pembelian barang dan jasa serta informasi spesifikasi barang dan jasa yang diadakan sangat diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja.

Dalam hal pengadaan bahan berbahaya dan beracun, belum dilakukan identifikasi khusus. Dalam penyimpanan bahan bakar misalnya masih di simpan bersama diruang alat, namun telah ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu penempatan alat.

Maka perlunya barang yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam penyimpanannya diletakkan di area khusus yang tidak diperuntukkan penempatan alat-alat yang sering digunakan, karena dapat mengganggu dalam distribusi. Area bengkel yang aman dan tidak menimbulkan resiko bahaya bagi semua pihak yang ada di area bengkel. Karena identifikasi terhadap bahan berbahaya juga dapat meminimalkan resiko terjadinya kerugian bila terjadi keadaan darurat,

karena bahan berbahaya telah dilokalisir penyimpanannya.

f.Lingkungan Kerja

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 85,71%. Dikarenakan dalam pelaksanaannya telah terdapat penguncian, tanda atau rambu di area bengkel yang ada di BLPT Yogyakarta. Bengkel dibuka supaya siswa dapat masuk saat sebelum jam diklat dimulai, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kebersihan yang terlaksana setiap hari dilaksanakannya diklat. Kebersihan terlihat dari lingkungan setiap seksi terutama area bengkel yang bersih. Area bengkel yang bersih ini dapat membuat dilaksanakannya praktik/ diklat lancar dan nyaman. Saat istirahat, peserta didik tidak diperkenankan berada di area bengkel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat tidak ada pengawasan dari instruktur. Sedang area dikunci saat praktik sudah selesai semua pada akhir jam diklat.

Sesuai data *layout* bengkel dalam dokumentasi, mesin-mesin telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat membuat nyaman peserta didik saat praktik, serta praktik dapat berjalan aman dan lancar. Tanda atau rambu juga terpasang di area bengkel, yakni rambu untuk lalulintas di bengkel, tulisan penggunaan APD saat praktik dan poster K3. Selain itu di lingkungan bengkel

juga tersedia fasilitas air bersih, MCK telah sesuai dengan standar. Di area bengkel setiap seksi telah tersedia alat pemadam kebakaran ringan (APAR). Lingkungan kerja harus mempunyai fasilitas yang sangat dibutuhkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya bahaya kebakaran. Satu hal yang mengganggu di area bengkel adalah masih terdapatnya barang-barang yang tidak diperlukan saat praktik di area bengkel. Hal ini terjadi hampir di semua seksi. Selain dapat mengganggu kegiatan praktik, barang-barang yang tidak diperlukan di area bengkel dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap K3.

g. Pemeliharaan, Perbaikan Sarana

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perbaikan sarana di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66,66% dan angka tersebut dalam kategori cukup. Sesuai dengan Pernyataan bapak Sumartaya dan data pengadaan barang dalam dokumentasi, bahwa peremajaan sarana telah dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan pelaksanaan praktik. Peremajaan dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana baru, namun bila tidak ada perawatan yang teratur maka dapat menimbulkan potensi bahaya. Meskipun angka kecelakaan yang ditimbulkan oleh mesin 15-25% dari seluruh kecelakaan biasanya angka beratnya kecelakaan adalah tinggi

Kesiapan Penerapan Sistem (Agus Dwi Prabowo) 27
(Suma'mur, 1985: 203). Sehingga perlunya peningkatan dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana. Diperlukan ketelitian dalam merawat dan menjaga peralatan inventaris yang ada di bengkel terutama terhadap ketidaksesuaian yang terjadi, sehingga adanya kerjasama seluruh pihak akan sangat membantu dalam hal ini.

h. Pemantauan Kesehatan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 33,33%. BLPT Yogyakarta telah memiliki pelayanan kesehatan. Ketercapaian yang masih kurang ini dikarenakan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar. Tidak terdapatnya dokter periksa atau petugas yang berjaga membuat pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal.

Sementara itu obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dimiliki juga tidak teridentifikasi dengan jelas, dengan tidak adanya catatan mengenai spesifikasi dalam kualitas dan kuantitasnya. Letak tempat pelayanan kesehatan ini juga jauh dari beberapa seksi di BLPT sehingga penggunaannya kurang maksimal. Bahkan beberapa instruktur belum mengetahui adanya tempat layanan kesehatan. Di BLPT Yogyakarta juga tidak terdapat asuransi bagi peserta didik. Hal ini dapat dimengerti karena memang tidak ada

aturan yang mengatur tentang penyediaan asuransi bagi peserta didik di BLPT Yogyakarta. Namun demikian hal ini bukan berarti tidak perlu dipermasalahkan, karena dengan adanya asuransi yang jelas juga dapat menimbulkan ketenangan peserta didik serta menjamin pelayanan kesehatan yang maksimal bila terjadi kecelakaan kerja. Sehingga perlunya pelaksanaan pemantauan kesehatan dapat berupa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan.

i. Pengawasan

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 66,66%. Peserta didik sudah diawasi sesuai dengan tingkat resiko saat melakukan praktik diklat. Sesuai PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam merencanakan penerapan K3 memprioritaskan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat resiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi diprioritaskan. Hal ini dikarenakan instruktur telah mengidentifikasi bahaya dan membuat upaya pengendaliannya, meskipun tidak tercakup secara menyeluruh dalam prosedur identifikasi. Identifikasi terindikasi dari penyertaan aspek K3 yang tertuang dalam pengantar jobsheet.

j. P3K

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, Hal ini sesuai PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup sampai mendapat pertolongan medik.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya tim/ personal khusus yang menangani P3K di setiap seksi di BLPT Yogyakarta. Berdasarkan pernyataan bapak Heru S. dan bapak Sumartaya, bahwa di BLPT Yogyakarta belum ada penunjukkan petugas P3K secara khusus dan belum ada pelatihan P3K untuk instruktur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.15/ Men/ Viii/ 2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja Pasal 1, P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/ buruh/ dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Sehingga belum adanya pelatihan khusus P3K kepada instruktur sebagai penanggung jawab saat terjadinya kecelakaan kerja pada waktu

pelaksanaan praktik, dapat membuat pertolongan yang diberikan kurang tepat.

BLPT Yogyakarta telah memiliki fasilitas kotak P3K dengan isi. Namun dari hasil observasi perlengkapan P3K ini juga belum sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku. Bila menilik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Per.15/Men/Viii/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja, maka kotak dan isi perlengkapan P3K tidak sesuai dalam bentuk kotak, jumlah baik jenis maupun kapasitas, petunjuk dan penempatannya yang masih ditemukan bukan pada area kerja (bengkel). Tidak adanya catatan tentang isi kotak juga membuat kurangnya pengawasan terhadap masa kadaluarsa isi perlengkapan kotak P3K. Maka dari itu, ketersediaan fasilitas P3K yang telah dimiliki perlu ditingkatkan keefektifannya. Perlu diperhatikan mengenai bahan tempat (kotak) penyimpanan peralatan P3K khususnya obat-obatan atau alat P3K yang perlu disimpan pada tempat kedap udara. Selain itu penempatan peralatan P3K juga perlu ditempatkan di sekitar area bengkel. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat tindakan pertolongan, karena area bengkel adalah tempat yang paling memiliki potensi kecelakaan.

k. Kesiapan Keadaan Darurat atau Bencana

Dalam PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perlunya prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan keadaan darurat atau bencana di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 25%. Hal ini karena belum ada prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas. Di BLPT Yogyakarta hanya terdapat alat penanganan keadaan darurat kebakaran yaitu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) di setiap lingkungan BLPT Yogyakarta. Sesuai dengan yang dikatakan bapak Sumartaya, prosedur tertulis untuk keadaan darurat memang belum ada, tetapi untuk alat pemadam kebakaran selalu diperbarui dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan pengadaan perawatan dari pusat (BLPT Yogyakarta).

Namun tidak terdapatnya prosedur dan pelatihan simulasi keadaan darurat dapat membuat peserta didik dan warga BLPT Yogyakarta kurang tahu penanganan yang tepat bila terjadi keadaan darurat. Di setiap tempat kerja pada perusahaan-perusahaan di

Indonesia, saat ini disediakan tempat berkumpul bila terjadi keadaan darurat. Ini menjadikan evakuasi personil yang ada di tempat kerja saat terjadi keadaan darurat menjadi mudah, dan memungkinkan pertolongan pertama yang memadai saat terjadi kecelakaan pada keadaan darurat. Tidak adanya penandaan keadaan darurat juga semakin menyulitkan bila terjadi hal bahaya secara mendadak. Bahkan dalam observasi ditemukan, terdapat ketidaksesuaian pemisah area *stall* bila dihubungkan dengan penanganan kesiapan keadaan darurat atau bencana, dimana area *stall* dipisahkan dengan pagar besi. Hal ini tentu menyulitkan evakuasi saat keadaan darurat bencana terjadi, mempertimbangkan dari posisi Yogyakarta sendiri yang masuk dalam daerah rawan bencana gempa bumi.

5. Evaluasi kebijakan K3

Dalam penjelasan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan guna mencapai tujuan SMK3 perlu melakukan tinjauan ulang atau evaluasi terhadap kebijakan K3.

Kebijakan K3 yang tertulis secara rinci di BLPT Yogyakarta belum ada. Hal ini membuat tidak adanya evaluasi kebijakan K3 yang tertulis sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3. Sehingga evaluasi kebijakan K3 di BLPT Yogyakarta

sesuai dengan pedoman sistem manajemen K3 memiliki ketercapaian 0%. Namun pihak BLPT Yogyakarta sebenarnya melaksanakan evaluasi yang bersifat praktis, termasuk kekurangan sarana penunjang K3 yang ada pada setiap seksi. Evaluasi yang dilaksanakan satu arah ini akan menjadi lebih baik jika dilaksanakan dua arah. Dalam hal ini pimpinan juga turut serta dalam evaluasi K3 di setiap seksi yang dapat diwujudkan dalam suatu sistem manajemen K3. Sehingga sejalan dengan peningkatan pelaksanaan K3 BLPT Yogyakarta yang akan diupayakan pada masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di BLPT Yogyakarta diperoleh kesimpulan kesiapan penerapan sistem manajemen K3 di BLPT Yogyakarta memiliki ketercapaian 37,78% sehingga masuk pada kriteria kurang siap.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran guna meningkatkan keberhasilan dalam meningkatkan pelaksanaan K3 di BLPT Yogyakarta khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan gerakan budaya K3 yang menyeluruh terhadap seluruh masyarakat di lembaga pendidikan khususnya di BLPT Yogyakarta dalam menyiapkan

sumber daya menghadapi era perdagangan bebas.

2. Manajemen pelaksanaan K3 dengan melakukan segera dan bersikap tegas dalam menerapkan pedoman K3, terutama pada pelaksanaan kebijakan K3, pembentukan Tim K3 dan pelaporan insiden akibat kecelakaan kerja, serta perlunya melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan K3 apabila masih dirasa ada kekurangan dalam pelaksanaannya.
3. Pembuatan dan penataan dokumen-dokumen K3 maupun sistem manajemen K3, sehingga berguna untuk pelaksanaan dan peningkatan K3.
4. Partisipasi pimpinan tertinggi pada pelaksanaan K3 khususnya adalah penentuan kebijakan K3 dan evaluasi K3.
5. Peran pemerintah dalam membuat peraturan sistem manajemen K3 yang diberlakukan dan sesuai dengan keadaan di lembaga pendidikan khususnya pendidikan teknik dan kejuruan, yang sejalan dengan kebutuhan dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin KSPSI. (2013). *Kecelakaan Kerja di Indonesia masih Tinggi*. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari <http://kspsi.com/berita-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi/>.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asngari, Musal. (2013). *Sistem Pengelolaan Dokumen Smm Iso 9001:2008 Blpt Yogyakarta Berbasis Web*. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta.
- Balai K3 Bandung. (2008). *Keselamatan Kerja*. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari <https://hiperkes.wordpress.com/2008/03/03/keselamatan-kerja/>.

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Daryanto. (2010). *Keselamatan Kerja Peralatan Bengkel dan Perawatan Mesin*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Tenaga Kerja. (1970). *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.

_____. 1996. *Peraturan Menteri No. 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hernisatyanto. (2011). *Analisis Kebijakan Porsi SMK 70 dan SMA 30*. Diakses tanggal 8 Maret 2014 dari <https://henisatyanto.wordpress.com/2011/07/22/analisis-kebijakan-porsi-smk-70-dan-sma-30/>.

International Labour Organization. (2013) *Campaign World Day for Safety and Health at Work 2013*. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_204594/lang--en/index.htm.

_____. (2013) *Safety and health at work*. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari <http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>.

Irawan, David. (2010). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Diakses tanggal 8 Maret 2014 dari <https://davideraone.wordpress.com/15/>.

Izaz, Bahar Al. (2013). *Studi Kasus Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/ 2014. Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

- Kementerian Sekretariat Negara. 2012. *PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kemensesneg.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2013). Cegah Kecelakaan Kerja, Kemnakertrans Kerahkan 138 Mobil URC. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=118.
- Konsultan ISO. (2011). *Prinsip Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008*. Diakses tanggal 8 Maret 2014 dari <http://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/prinsip-sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/>.
- Mangkunegara, Prabu. Anwar. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A.S. (1987). *Pendekatan Manuia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian* Cetakan Ke – 2. Jakarta: Gunung Agung.
- Nurhayat, Wiji. (2012). *Angka Kecelakaan Kerja di RI Masih Tinggi*. Diakses tanggal 3 Maret 2014 dari <http://finance.detik.com/read/2012/10/16/120952/2063698/4/angka-kecelakaan-kerja-di-ri-masih-tinggi>.
- Nuryadi. 2008. *Indikator Kinerja SMK Bertaraf Internasional*. Diakses tanggal 8 Maret 2014 dari <http://mmsmk3tegal.blogspot.com/2008/05/indikator-kinerja-smk-bertaraf.html>.
- Ridley, John. (2008). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Ikhtisar) edisi ke-3 (Alih bahasa: Soni Astantro, S.Si). Jakarta: Erlangga.
- Rukhviyanti, Novi. (2009). *Pengaruh Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Pada Perusahaan Garmen di Kawasan Industri Rancaekek*. *Jurnal Sains*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suma'mur. (1985). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tasliman, H.A. (1993). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Bahan Ajar). Yogyakarta: UNY.